

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahasa dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam setiap masyarakat selalu terdapat pemimpin. Pada masyarakat tradisional pemimpin disebut *pengetua* atau *datuk*, sedangkan dalam masyarakat modern pemimpin itu disebut kepala atau ketua dengan istilah yang beraneka ragam. Misalnya: Kepala Desa, Kepala Daerah, Kepala Wilayah, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK, Ketua DPA, atau nama lain yang mengacu pada konsep kepala dan ketua seperti Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Perdana Menteri, Presiden, dan sebagainya.

Setiap orang yang menyandang atau pada dirinya melekat salah satu sebutan di atas, disebut pemimpin. Kemudian pada setiap pemimpin melekat pula tugas untuk memimpin masyarakat dalam hal mengatur, menertibkan, mengarahkan, dan membuat kebijakan. Farland (Handyaningrat, 1983:64) menggambarkan pemimpin itu sebagai orang yang memberikan perintah/pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian tentang pemimpin dalam masyarakat atau bangsa yang dilakukan oleh para ahli

selalu dikaitkan dengan konteks kekuasaan dan politik. Dari aspek kekuasaan pemimpin disebut penguasa. Weber (1947:62) mengatakan kekuasaan adalah kemampuan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Sedangkan dari aspek politik pemimpin dilihat sebagai perumus atau pembuat kebijakan politik. Almond dan Easten menyebutnya sebagai pengambil keputusan (*decision maker*).

Pemimpin sebagai penguasa selalu merumuskan pemikiran konseptual dalam bentuk kebijakan politik kemudian diinformasikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengerti, memahami, dan melakukan tindakan sesuai dengan keinginan penguasa. Agar kebijakan politik dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat, maka kebijakan itu harus diungkapkan dengan kosakata bahasa yang sederhana dan mengandung makna denotatif.

Para penguasa dalam merumuskan pemikiran konseptual atau keputusan politik selalu menghasilkan ragam bahasa politik, yaitu bahasa yang dituturkan oleh penguasa (pemerintah) yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui kebijakan akan terjadi interaksi antara penguasa (pemerintah) dengan masyarakat (yang diperintah), dan akhirnya diharapkan

adanya suatu tindakan dari masyarakat sesuai dengan keinginan penguasa.

Ragam bahasa politik yang dikemukakan oleh penguasa disosialisasikan ke dalam masyarakat melalui media massa. Dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, diharapkan informasi akan meluas baik dalam jumlah orang maupun luas wilayah yang dapat dijangkaunya. Dalam mensosialisasikan bahasa politik dalam media massa, peran wartawan sangat diperlukan dalam menjembatani informasi yang dituturkan penguasa untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Dalam hal ini wartawan tidak harus menyalin bulat-bulat apa yang disampaikan oleh penguasa, tetapi sebaiknya disaring kembali dengan menggunakan kata-kata yang lebih sederhana tanpa mengubah arti yang dimaksudkan. Sumarno (1989:87) mengatakan media komunikasi dapat membantu melipatgandakan pesan-pesan komunikasi yang disampaikan pada masyarakat, baik secara nasional, transnasional, ataupun secara internasional.

Dalam bidang politik, media komunikasi khususnya surat kabar dapat dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan masalah politik, alat pendidikan politik, serta propaganda politik. Oleh karena itu, Alexis (1980:271) mengatakan bahwa perilaku politik dan orientasi politik dapat dipelajari dari media massa, apabila materi politik cukup tersedia dalam media tersebut, dan apabila audiensi sendiri mau memperhatikan materi tersebut. Alwasilah (1997:48) mengatakan selain sebagai indikator kemajuan bangsa dan ciri



negara-negara maju, media massa juga merupakan institusi yang memiliki peran sosial politik yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, khususnya pendidikan bahasa. Pemahaman akan institusi ini adalah bagian dari pemahaman sosial politik masyarakat.

Pada negara yang telah maju, masyarakat lebih banyak menggunakan media televisi dan surat kabar seperti yang ditunjukkan oleh hasil riset Marilyn dan Sidney pada tahun 1978-1979 (Sumarno, 1989:87), menunjukkan bahwa peran televisi 34%, disusul surat kabar 22%, selebihnya radio, film, buku-buku, majalah, dan recording, masing-masing menunjukkan angka tidak lebih dari 5%. Ini menunjukkan bahwa peran media massa, khususnya surat kabar sangat besar dalam mensosialisasikan ragam bahasa politik yang dibuat oleh penguasa.

Ragam bahasa politik yang dituturkan penguasa banyak dikemas dalam kosakata yang membingungkan, mengandung makna kiasan bukan denotatif, sehingga masyarakat untuk mengerti dan memahaminya. Akibatnya, sulit pula untuk diserap atau dicerna oleh masyarakat sesuai dengan harapan penguasa. Selain itu, persoalan dalam ragam bahasa politik banyak pula yang bersifat kamufase, artinya sesuatu yang diucapkan atau yang diungkapkan lain dengan tujuan yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Seminar Kebahasaan di Bandar Seribegawan, 3-4 Maret 1997 mengatakan

bahwa para pejabat pun harus dididik bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (*Kompas*, 5 Maret 1997). Dikatakannya, ucapan-ucapan pejabat sebagai sumber berita banyak yang menyimpang dari struktur tatabahasa. Ironisnya, penyimpangan-penyimpangan itu menyebar bagai penyakit menular kepada pejabat-pejabat lain yang ada pada tataran lebih rendah.

Sebagai contoh, ragam bahasa politik yang mengandung makna yang tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya antara lain: bukan *kenaikan harga* tetapi *penyesuaian harga*, bukan *ditangkap* tetapi *diamankan*, bukan *dipecat* tetapi *dibebastugaskan*, bukan *asas tunggal* tetapi *satu-satunya asas*, bukan *korupsi* tetapi *komersialisasi jabatan*, dan berbagai kosakata bahasa yang dimunculkan oleh penguasa seperti contoh di atas. Jadi, kosakata bahasa yang dikemukakan itu bergeser maknanya, bahkan kadang-kadang berbeda sama sekali dari makna semula.

Dalam Undang-undang No.3 tahun 1985, disebutkan setiap organisasi sosial politik dan organisasi sosial kemasyarakatan harus memakai *satu-satunya asas* yaitu Pancasila. Walaupun semua orsospol dan ormas hanya berasaskan Pancasila, asas ini tidak dapat disebutkan sebagai *asas tunggal*. Demikian juga dengan *kenaikan harga*, diganti dengan *penyesuaian harga*. Di sini juga ada semacam perbedaan makna dari kedua istilah tersebut, padahal dalam praktiknya kedua kata tersebut mempunyai makna

yang sama, artinya dalam istilah *kenaikan harga* terjadi penambahan harga, misalnya sebuah pensil dijual Rp 100,00, seminggu kemudian pensil tersebut dijual Rp 125,00. Dari penjualan Rp 100,00 menjadi Rp 125,00, disebut terjadi kenaikan harga sebanyak Rp 25,00. Ternyata dalam istilah penyesuaian harga kasusnya sama dengan contoh di atas. Kenaikan harga Rp 25,00 disebut *penyesuaian harga*, tetapi ke mana kenaikan harga itu disesuaikan tidak jelas. Di samping itu penambahan harga Rp 25,00 itu seolah-olah bukan merupakan kenaikan harga. Demikianlah yang dilakukan oleh pengambil keputusan dalam membuat kebijakan.

Adapun contoh ragam bahasa politik yang bersifat kamufase antara lain sebagai berikut: Para pakar yang membicarakan atau menganalisis tentang kesenjangan sosial dikatakan *terlalu membesar-besarkan kesenjangan sosial*, kemudian dilarang membesar-besarkan kesenjangan sosial itu. Ini berarti para penguasa melarang orang untuk mengkaji dan menganalisis masalah kesenjangan sosial. Masyarakat yang memprotes ketimpangan-ketimpangan yang ada sekarang dikatakan oleh penguasa *anti kemapanan*. Masyarakat yang melakukan unjuk rasa untuk menuntut haknya dikatakan oleh penguasa *tindakan kontraproduktif*, dan masih banyak ragam bahasa politik yang dituturkan penguasa yang bersifat kamufase.

Bila ditinjau secara mendalam, ragam bahasa politik yang digunakan oleh para penguasa dan dimuat dalam media cetak, khususnya surat kabar



dewasa ini, tampak lebih menonjolkan aspek politis daripada memberikan pengertian atau pemahaman yang jelas dalam kehidupan masyarakat. Artinya, bahasa politik sering mengandung dua aspek makna dan yang dimaksudkan bukan makna sebenarnya. Hal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Persepsi itu bisa bersifat positif atau negatif. Di samping itu, masyarakat menjadi bingung sehingga kehilangan pedoman dan arah, akhirnya dapat menimbulkan krisis kepercayaan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah dikemukakan terdahulu, penulis ingin mengetahui lebih jauh penggunaan ragam bahasa politik yang ada di media cetak, dan meneliti makna-makna yang terdapat dalam ragam bahasa politik tersebut melalui analisis semantik.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut.

- 1) bagaimanakah makna ragam bahasa politik yang digunakan oleh para penguasa dalam media cetak ?
- 2) makna apa sajakah yang terdapat dalam ragam bahasa politik yang digunakan oleh para penguasa dalam media cetak?

- 3) apakah tujuan penggunaan ragam bahasa politik oleh para penguasa dalam media cetak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

- 1) untuk memperoleh gambaran tentang makna ragam bahasa politik yang digunakan oleh para penguasa dalam media cetak.
- 2) untuk mengetahui makna apa saja yang terdapat dalam ragam bahasa politik yang digunakan oleh para penguasa dalam media cetak.
- 3) untuk memperoleh gambaran tentang tujuan penggunaan ragam bahasa politik oleh para penguasa dalam media cetak.

### **D. Anggapan Dasar**

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disinggung pada bagian terdahulu, maka anggapan dasar atau asumsi yang dikemukakan dalam studi ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bahasa politik mempunyai fungsi dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, karena bahasa politik menyangkut kebijakan pemerintah, pengaturan, pengarahan, dan bimbingan kepada



masyarakat.

- 2) Untuk menciptakan persepsi yang sama antarmasyarakat, dan antara masyarakat dengan penguasa (pemerintah), diperlukan pengertian dan pemahaman yang sama terhadap bahasa politik yang digunakan oleh para penguasa.
- 3) Agar bahasa politik dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, maka bahasa politik harus diungkapkan dalam kosakata yang sederhana dan jelas maknanya.
- 4) Bahasa politik yang mempunyai banyak makna akan sulit dipahami oleh masyarakat, dan akan menimbulkan persepsi yang bermacam-macam.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan dilaporkan dalam bentuk laporan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

- 1) Bagi dunia akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan bahasa Indonesia. Hasil penelitian merupakan gabungan dari pengetahuan teoretis yang diperoleh dari berbagai literatur dan pengetahuan empiris yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Bila kedua dimensi ini (pengetahuan teoretis dan empiris) dapat digabungkan dan saling mengisi, maka studi ini dapat

memperluas khazanah ilmu pengetahuan, sehingga akan memperluas cakrawala penalaran penutur bahasa Indonesia.

- 2) para birokrat atau pemimpin yang berada dalam institusi pemerintah maupun swasta yang bertugas membuat keputusan dan kebijakan. Agar keputusan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, maka keputusan itu perlu disampaikan melalui kosakata yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan salah pengertian atau salah persepsi.

